

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di pulau Sumatera tahun 2013-2016. maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di pulau Sumatera. Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah provinsi di pulau Sumatera. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
2. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di pulau Sumatera. Variabel Dana Perimbangan menunjukkan bahwa semakin besar dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah maka semakin turun Kinerja Keuangan Pemerintah.
3. Belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif secara langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di pulau Sumatera. Artinya komponen Belanja Modal ternyata tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan pemerintah provinsi di pulau Sumatera. Ternyata dengan bertambahnya dana untuk meningkatkan desentralisasi daerah menjadi sebuah kesempatan bagi sejumlah oknum untuk melakukan tindakan korupsi. Hal tersebut yang dapat merugikan pemerintah dan menurunkannya Kinerja pemerintah di mata masyarakat.
4. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian kedepannya sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan kajian ulang terhadap penelitian ini disarankan untuk menambah atau mengganti dengan variabel lain yang tidak diikutsertakan seperti rasio hutang pemerintah daerah, belanja pegawai, penambahan penduduk, tingkat investasi pemerintah dan lain sebagainya.
2. Mengganti pengukuran rasio kinerja keuangan pemerintah daerah seperti tingkat kemandirian daerah, rasio efisiensi dan rasio efektivitas dan lain sebagainya. Menambah jumlah sampel dan rentang periode penelitian.
3. Menambah sumber-sumber informasi terkait pengungkapan laporan realisasi APBD seperti untuk mendapatkan laporan realisasi yang terupdate yang berupa fisik pada daerah-daerah yang diteliti.